

**EVALUASI TERHADAP POTENSI PENDAPATAN
DAERAH DARI SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Kasus di Pemda Kabupaten Klaten)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas
Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

TRI MAYULIA

B 200 050 040

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur. Menurut Todaro (2003), bahwa pembangunan adalah harus diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa dan lembaga-lembaga Nasional, termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan absolute.

Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya adalah tersedianya dana yang cukup. Menurut Rahayu, dana atau biaya pembangunan daerah pada dasarnya didukung oleh tiga kelompok sumber dana yaitu dana yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Alokasi dari Pusat
3. Dana melalui investasi swasta

Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengambil keputusan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berkaitan dengan pemerintah daerah dan keuangan daerah pemerintah pusat memberikan

kewenangan dan hak bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur keuangan daerahnya sendiri secara mandiri dan ini diwujudkan dalam UU.No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dan UU No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk lebih mengoptimalkan potensi keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, maka pemerintah daerah diharapkan untuk mampu menggali segenap potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut berdasarkan asas keadilan dan asas manfaat (Syamsi, 1993).

Kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah merupakan hal yang bersifat *urgent*. Kaho (1999) mengatakan bahwa keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam melaksanakan pemerintahan secara baik. Untuk dapat mewujudkan kemampuan keuangan daerah yang baik, maka diperlukan sumber daya yang memadai. Setiap daerah terutama daerah tingkat II, memiliki perbedaan kontribusi masing-masing pos penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan evaluasi mengenai potensi pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah.

Hal ini didukung dengan adanya UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tampak bahwa PBB merupakan sumber utama dari pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten dan kota dan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (otonomi daerah) pasal 80 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan hasilnya diserahkan kepada daerah, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup besar dan masih mempunyai potensi untuk dikembangkan peningkatannya baik jangka pendek maupun jangka panjang sebagai pembiayaan kegiatan pembangunan daerah.

PBB Menurut UU No. 12 tahun 1994 bahwa pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan. Pajak kebendaan adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak tetapi hanya memperhatikan obyek pajak saja. Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber yang potensial bagi penerimaan negara untuk membiayai pembangunan Nasional, khususnya pembangunan daerah karena obyeknya tersebar di seluruh tanah air.

Obyek bumi merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomi dan jumlah yang relatif tetap dan nilainya terus bertambah dari tahun ke tahun. Dengan diadakannya pemungutan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan diharapkan akan meningkatkan penerimaan daerah, sehingga mampu membiayai kegiatan pembangunan daerah masing-masing yang pada akhirnya akan terwujud suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Alasan pentingnya dilakukan penelitian karena dengan dilakukannya evaluasi terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah, yaitu pajak bumi dan bangunan dapat dilihat sejauh mana kemampuan untuk mendapatkan penghasilan dari sektor pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan oleh suatu pemerintah daerah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijaksanaan dalam melakukan pungutan terhadap pajak bumi dan bangunan untuk tahun selanjutnya. Dengan diadakannya evaluasi ini dapat diketahui realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, prosentase realisasi penerimaan terhadap pendapatan daerah serta pertumbuhan setiap tahun yang kemudian selanjutnya dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB, yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai segala pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sumber pendapatan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan, oleh karena itu peneliti mengambil judul “EVALUASI TERHADAP POTENSI PENDAPATAN DAERAH DARI SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN”. (Studi Kasus di Pemda Kabupaten Klaten)

B. Perumusan Masalah

Pajak Bumi dan Bangunan dipungut oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam hal ini Pajak

Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Oleh karena itu peneliti mengambil permasalahan:

1. Seberapa besar rasio perbandingan realisasi penerimaan terhadap rencana penerimaan PBB untuk periode Tahun 2003-2007?
2. Berapa besar prosentase perbandingan realisasi penerimaan PBB terhadap Pendapatan Daerah dan rata-rata perbandingannya untuk periode Tahun 2003-2007?
3. Berapa tingkat pertumbuhan PBB dan rata-rata pertumbuhannya untuk periode Tahun 2003-2007?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang didapat dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan yang diharapkan agar mampu membiayai kegiatan pembangunan daerah. Untuk mempermudah evaluasi maka permasalahan diatas dengan terperinci dirumuskan singkat sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya mencakup data mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
2. Sampel penelitian yang digunakan jangka waktu dimana dibatasi dari periode tahun 2003 – 2007.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui seberapa besar rasio perbandingan realiasi penerimaan PBB yang dicapai terhadap Rencana Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode Tahun 2003-2007.
2. Mengetahui seberapa besar prosentase realisasi penerimaan PBB yang dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten untuk periode Tahun 2003-2007.
3. Memperoleh gambaran tentang tingkat pertumbuhan PBB terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi dinas pendapatan daerah kabupaten klaten dalam mengambil keputusan dalam pemungutan PBB.

2. Bagi Peneliti :

Manfaatnya bagi peneliti adalah untuk mengetahui penerapan teori yang didapat dari bangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya dan menambah pengetahuan dan pengalaman serta meningkatkan kemampuan meneliti bagi penulis.

F. Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori yang diharapkan akan mendukung pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini seperti pengertian dan tinjauan tentang pendapatan daerah, sumber-sumber pendapatan daerah, PAD (Pendapatan asli daerah), dana perimbangan, pinjaman daerah, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), tarif perhitungan PBB, rencana penerimaan PBB, Pembagian hasil penerimaan PBB.

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari: jenis data, obyek penelitian data dan sumber data, Metode pengumpulan data, analisis data.

BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum daerah penelitian, analisa data serta hasil analisa data terhadap data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, pembahasan.

BAB V PENUTUP

Meliputi kesimpulan dan saran, dimana disini penulis akan menerangkan hasil penelitian secara keseluruhan dalam suatu kesimpulan serta akan memberikan saran-saran bagi pihak yang bersangkutan terhadap masalah yang diteliti.